KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Siap Dikritik
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Siap Dikritik

Pada HUT Ke-81 DPR, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, rakyat bukan sekadar penerima keputusan negara. DPR harus mendengar aspirasi dan terbuka terhadap kritik.

JAKARTA, KOMPAS — Selama 81 tahun berdiri, DPR telah membentuk ribuan undang-undang, membahas anggaran, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, DPR menyadari masih terbuka ruang bagi lembaga itu untuk berbenah dan meningkatkan kualitas. Karena itu, DPR siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR telah menyelesaikan pembahasan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Pada tahun sidang 2026-2027, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 14 RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I, 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, dan 4 RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Selain itu, menyelesaikan perumusan draf 27 RUU.

Namun, menurut Puan, kinerja DPR tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, seperti memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang.

Politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyadari masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas DPR. Karena itu, DPR terbuka terhadap masukan dan kritik.

"Kami, DPR, akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat. DPR memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak tumbuh hanya dari apa yang disampaikan melalui kata-kata, tetapi terutama dari konsistensi antara aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, dan manfaat yang dapat dirasakan rakyat," kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-81 DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna khusus ini dihadiri pula oleh empat unsur pimpinan DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saat Mustopa. Rapat juga dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani beserta tiga wakilnya, yakni Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, dan Hidayat Nur Wahid. Hadir pula Ketua DPD Sultan B Najamudin.

Jaga kedaulatan rakyat

Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan bahwa upaya memperbaiki kinerja penting dilakukan untuk memastikan DPR menjalankan kedaulatan rakyat. Sebab, menurut Puan, kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, yakni suara rakyat didengar, aspirasinya diperjuangkan, hak-haknya dilindungi, dan kesejahteraannya menjadi tujuan penyelenggaraan negara.

Di era keterbukaan informasi dan teknologi digital, tuntutan terhadap kinerja DPR tersebut semakin nyata. Jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek, aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, kebijakan dapat diawasi secara lebih terbuka, dan masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk terlibat dalam percakapan publik.

"Demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, melainkan juga kesediaan untuk mendengar. Bukan sekadar mempertahankan perbedaan, melainkan kemampuan mengolah perbedaan menjadi keputusan bagi kepentingan bersama," tuturnya.

Inilah yang menurut Puan terus diperjuangkan dan disempurnakan DPR melalui fungsi-fungsinya. DPR terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Setiap undang-undang yang dihentuk, setiap rupiah anggaran negara yang disetujui, dan setiap kebijakan pemerintah yang diawasi harus memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Selama ini, DPR juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun daring, melalui situs web DPR. Sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026, jumlah total pengaduan masyarakat mencapai 9.205. Rinciannya, sebanyak 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui situs web, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan DPR. Seluruh aspirasi itu diminta untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah.

Catatan krusial

Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro, berpesan agar momentum HUT DPR menjadi ruang refleksi atas mandat konstitusional yang diberikan rakyat. Dari pemantauan IPC terhadap kinerja DPR, ada beberapa catatan krusial yang harus dievaluasi. Salah satunya, krisis partisipasi bermakna dalam legislasi. Masih ada kecenderungan proses legislasi yang elitis.

"Publik sering diposisikan hanya sebagai pendengar, bukan aktor yang suaranya diintegrasikan secara nyata ke dalam pasal-pasal perundang-undangan," katanya.

Kemudian, DPR kerap tampil lebih sebagai "stempel" bagi kebijakan eksekutif ketimbang sebagai mitra yang kritis. Pengawasan terhadap proyek strategis, tata kelola anggaran, serta kebijakan transisi energi sering kali tidak diikuti dengan desakan politik yang mengikat sehingga eksekutif bisa berjalan tanpa koreksi yang berarti.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, tumpulnya peran DPR sebagai penyeimbang kekuasaan akibat terlalu kuatnya dominasi koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Padahal, dua kamar ini, eksekutif dan legislatif, punya peran yang berbeda.

"Nah, sering kali ini menjadi satu paket yang harus dibayar mahal oleh rakyat Indonesia karena sedikit banyak membuat tupoksi dari kedewanan, utama soal fungsi pengawasan, menjadi tumpul, bahkan teramputasi. Semua berkata ya, semua berkata oke," ujarnya.

(BOW/DYT)